

STRATEGIC COMPREHENSIVE PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN KEPEMUDAAN DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN

Basrowi
Balitbang Depdiknas

Abstract: The goals of this research are: (1) identify the productive and innovative program of youth policy, (2) finding the productive and innovative models of youth policy, and (3) finding the pursue factor and the support factor of youth program. The time of research spent five months, since July to November 2005. The steps of research are fourteen steps. Research located at Bengkulu Province. Sample is taken by purposive for KUPP Program. Respondent composition are: young 40 respondent, bureaucrats 4 respondents, village head 4 respondents, partnership 3 respondents, student 4 respondents. The total sum of all respondents in every province are 55 respondents. The methods of data analysis uses qualitative and quantitative descriptive. Based on the result of research it concluded that government models of youth policy applied are: (1) able to absorb the employment and able to progress community prosperity, (2) able to build frame work of self government, capability, skill, motivation and work ethos.

Keywords: youth policy, youth program, innovative models

Generasi muda merupakan aset nasional yang harus didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga, pemuda sebagai kader bangsa mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila dilihat dari sejarah bangsa, pemuda sangat berperan dalam menghantarkan Indonesia mencapai kemerdekaan. Perjalanan sejarah juga membuktikan bahwa kepeloporan dan pembaruan bangsa banyak bersumber dari gerakan dan prakarsa pemuda. Dengan demikian, pemuda di Indonesia mempunyai peran yang sangat berarti dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, pembangunan generasi muda atau kepemudaan perlu mendapat perhatian tersendiri.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Sesuai dengan visi dan arah kebijakan pembangunan pemuda, maka pembangunan pemuda, dimaksudkan untuk: (1) menyamakan visi, misi dan persepsi tentang pembangunan dan pemberdayaan pemuda dalam menyikapi perubahan dinamika perkembangan yang terjadi di masa depan; (2) memadukan langkah serta implementasi kebijakan pembangunan dan

upaya pemberdayaan pemuda mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian, baik yang dilakukan pemerintah yang terkait di tingkat pusat dan daerah, maupun yang dilakukan masyarakat dan kalangan dunia usaha; (3) sebagai pedoman bagi instansi terkait dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kepemudaan, agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai untuk menghadapi tantangan perubahan di era persaingan internasional.

Pembangunan di bidang kepemudaan telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Program yang dimaksud bertujuan untuk memberdayakan sumber daya potensial pemuda menjadi sumber daya aktual secara berkesinambungan. Untuk itu, ke depan, perlu dicari program yang signifikan dengan peran pemuda, yaitu program yang mampu mengembangkan jati diri dan kapasitas pemuda.

Pembangunan bidang kepemudaan di tanah air memang membutuhkan perhatian yang serius dalam proses pembangunan. Hal ini didasari kenyataan bahwa pemuda memiliki peran positif bagi bangsa dan negara. Peranannya itu sendiri diwujudkan dalam bentuk pemikiran (ide/gagasan) dan tindakan yang selalu tidak memihak (independen) serta mengutamakan nilai-nilai ideal. Potensi yang dimiliki oleh pemuda itu, semakin diperkuat dengan potensi kuantitas pemuda yang ada di Indonesia. Dari 202,71 juta penduduk Indonesia, jumlah pemuda yang berusia antara 19-35 tahun mencapai 75,80 juta jiwa atau 37,39 % yang terdiri atas perempuan 51,05 % dan laki-laki 48,95%.

Tabel 1 Jumlah Pemuda Tahun 2000-2002 (dalam juta)

TAHUN	PENDUDUK	PEMUDA	%
2000	196,58	74,27	37,78
2001	201,70	75,48	37,42
2002	202,71	75,80	37,39

Sumber: Direktorat Kepemudaan, Dirjen PLSP Depdiknas (diolah)

Apabila dilihat stratifikasi usia pemuda antara 15 hingga 35 tahun dapat dikatakan pemuda merupakan kelompok usia yang produktif. Artinya, mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan skill dalam bekerja. Distribusi pemuda sebagai kelompok usia yang produktif hampir merata antara kota dengan desa.

Tabel 2 Prosentase Distribusi Pemuda Menurut Kelompok Umur Tahun 2002

USIA	PERKOTAAN	PEDESAAN
15 – 29	25,98	27,10
20 – 24	24,89	22,43
25 – 29	22,78	22,83
30 – 35	26,35	27,65

Sumber: Direktorat Kepemudaan, Dirjen PLSP Depdiknas (diolah)

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pemuda hanya sampai lulusan SMA. Bahkan lebih dari itu persentase pemuda yang tingkat pendidikannya hanya sampai sekolah dasar cukup tinggi yaitu 33,8 % untuk pria dan 37,06% untuk wanita. Tingkat

pendidikan ini setidaknya akan mempengaruhi kemampuan pemuda dalam menganalisa berbagai persoalan yang dihadapinya.

Tabel 3 Persentase Pemuda Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2002

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita
Tidak/belum pernah sekolah	1,34	2,46
Tidak tamat SD	8,04	9,67
SD	33,88	37,06
SMP	26,88	24,81
SMA	25,47	21,55
D III	1,75	2,18
SARJANA	2,66	2,26

Sumber: Direktorat Kepemudaan, Dirjen PLSP Depdiknas (diolah)

Berbagai lapangan usaha yang dapat dilakukan oleh pemuda, seperti perdagangan, industri, jasa memang lebih banyak dilakukan dikota ketimbang di desa. Sedangkan khusus untuk pertanian, memang lebih mungkin dilakukan di pedesaan. Hal ini disebabkan ketersediaan lahan untuk pertanian, lebih banyak dijumpai di pedesaan.

Tabel 4 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002

Lapangan Usaha	Perkotaan	Pedesaan
Pertanian	8,70	62,10
Industri	33,06	15,85
Perdagangan	28,97	11,33
Jasa	29,18	10,68
Lainnya	0,09	0,04

Sumber: Direktorat Kepemudaan, Dirjen PLSP Depdiknas (diolah)

Berkaitan dengan jumlah pengangguran pemuda, untuk wilayah perkotaan, pemuda yang menganggur lebih banyak bertalar belakang pendidikan SMA (35,60%). Sedangkan di pedesaan, pemuda yang menganggur lebih banyak berlatarbelakang SD (38,09%). Suatu realita yang memerlukan keseriusan pemerintah untuk menangani masalah pengangguran khususnya yang terjadi pada pemuda

Tabel 5 Persentase Pemuda Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2002

Tingkat Pendidikan	Perkotaan	Pedesaan
Tidak/Belum Tamat SD	4,82	10,63
SD	17,13	38,09
SMP	22,05	27,58
SMA	35,60	21,16
Akademi/Perguruan Tinggi	10,40	2,54

Sebagaimana diketahui, derasnya penetrasi budaya dan pengaruh global akibat cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, telekomunikasi dan transportasi cenderung mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku pemuda di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sementara itu, iklim bagi pengembangan diri pemuda kurang kondusif yang ditandai oleh pendekatan pengembangan pemuda yang bersifat otoriter dan represif. Hal ini terkait pula dengan lemahnya pranata pembangunan kepemudaan. Di samping itu, banyak organisasi kepemudaan masih belum mandiri dan konsisten dalam menyelenggarakan visi dan misinya.

Permasalahan yang lain yaitu kurangnya ketersediaan wacana-wacana baru juga menghambat bakat, minat dan inovasi pemuda dalam berkreasi dan berprestasi. Dalam dekade terakhir banyak prasarana dan sarana yang semula diperuntukkan bagi peningkatan peran dan kualitas pemuda, telah mengalami perubahan fungsi. Kesemuanya ini menghambat proses peningkatan kualitas dan peran pemuda, sehingga mengarah pada ketidakmandirian, penumpukan kreativitas, dan ketidaksiapan dalam bersaing secara sehat.

Semua hal di atas juga turut mempengaruhi terjadinya berbagai tindakan kekerasan dan kriminalitas yang sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dalam bentuk tawuran, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular, penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya,

Permasalahan lainnya adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur. Hal itu disebabkan oleh cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda, sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing pemuda. Sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan pemajuan HAM yang akan memunculkan masalah-masalah baru di bidang kepemudaan. Sejalan dengan laju globalisasi akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa di kalangan pemuda. Hal ini akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Tantangan lain adalah belum terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.

Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah: *Pertama*, dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan kesempatan, ialah derasnya arus mobilisasi pemuda baik yang berpendidikan maupun yang putus sekolah dari desa ke kota dan dari lapangan pekerjaan di bidang pertanian kepada pekerjaan/jasa yang di perkotaan. Sehingga terjadi penumpukan pemuda pada satu jenis pekerjaan tertentu yang berada di perkotaan. *Kedua*, dalam kaitannya

dengan peningkatan mutu dan relevansi, adalah munculnya gerakan demokratisasi dan HAM yang akan memunculkan masalah-masalah baru di bidang kepemudaan. *Ketiga*, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, ialah belum terumuskannya kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.

Dampak buruk dari kondisi tersebut antara lain adalah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang tidak memiliki semangat dan toleransi terhadap persaingan dan kemajemukan, tidak berahlak dan bermoral, tidak memiliki sikap dan perilaku kebersamaan, serta tidak berwawasan kebangsaan. Oleh karena itu, perlu diciptakan berbagai program kepemudaan yang bersifat inovatif dan produktif.

METODE

Proses penelitian berlangsung selama 5 bulan yaitu sejak minggu keempat Juli sampai dengan minggu keempat November 2005. Tahapan penelitian terdiri atas 14 tahap, yaitu studi eksplorasi, penyusunan desain penelitian, seminar-lokakarya, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, analisis hasil uji coba instrumen, finalisasi instrumen, proses pengumpulan data, *Focus Group Discussion* (FGD), pengolahan data, analisis data, perumusan dan pembahasan rancangan kebijakan, ekspose, finalisasi rancangan kebijakan, dan penyusunan laporan. Populasi penelitian adalah pemuda yang mengikuti program KUPP di provinsi Bengkulu. Komposisi responden meliputi pemuda 40 responden, pejabat dinas yang menangani pemuda 4 orang, Lurah/kepala desa 4 orang, mitra usaha 3 mitra, siswa 4 siswa. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 55 responden. Instrumen penelitian terdiri atas instrumen untuk pemuda, dinas yang menangani kepemudaan, mitra kerja pemuda, kepala desa/lurah, dan siswa. Instrumen penelitian terdiri atas sejumlah pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Pemerintah daerah Bengkulu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan kepemudaan. Kegiatan kepemudaan yang terselenggara pada umumnya mengandalkan dana dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Berbagai jalur dalam pendistribusian dana pemerintah, antara lain: melalui Dinas Pendidikan subdin kepemudaan dan olah raga, Dinas Sosial dan kegiatan swadaya masyarakat sebelum tahun 2005. Tetapi mulai tahun 2005 dengan berdirinya Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga, maka kegiatan kepemudaan ada di bawah wewenangnya.

Kebijakan Program Pembinaan Kepemudaan

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan pembangunan pemuda adalah tersiapkannya pemuda sebagai kader pemimpin bangsa; terlindunginya segenap pemuda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya; serta berkembangnya minat dan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri. Oleh karena itu, sasaran yang akan dicapai adalah: (a) meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan; (b) terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan

pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggungjawab; (c) meningkatnya jumlah wirausahawan muda; (d) meningkatnya jumlah karya, kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan khususnya dalam seni, budaya, iptek, informasi, dan pariwisata baik nasional maupun internasional; (e) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda; (f) meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; dan (g) menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Sehubungan itu, maka kebijakan program pelaksanaan pembinaan pemuda di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pembinaan melalui jalur sekolah dilakukan secara terintegratif dengan proses belajar-mengajar di sekolah. Sedangkan pada jalur luar sekolah, selain melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS), juga dilakukan melalui Organisasi-organisasi Kepemudaan.

Program-program pembinaan tersebut pada dasarnya mengacu pada program-program yang telah digariskan dalam kebijakan kepemudaan, namun dalam pengembangan di lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, serta aspirasi dan inspirasi para pemuda itu sendiri.

Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan pemuda melalui jalur sekolah, khususnya dalam hal ini pada para pemuda yang masih berstatus siswa SLTA, pada dasarnya dilaksanakan cukup banyak dan beragam. Namun, dengan memperhatikan kedudukan pemuda tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler guna mendukung kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah, baik pada jam-jam belajar maupun di luar jam belajar dengan bimbingan guru. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan yang dilaksanakan tersebut relatif kurang mengarah kepada program pembinaan *life skill* pada siswa sebagaimana program pembinaan ataupun pendidikan yang tengah digalakkan pemerintah saat ini.

Pembinaan kegiatan atau program kepemudaan di luar jalur sekolah di Provinsi Bengkulu ditangani oleh Dispora dan Dinas Diknas dan melalui Organisasi Kepemudaan (OKP) dengan bekerja sama pada pihak-pihak yang relevan dengan kegiatan/program yang dilaksanakan. Organisasi Kepemudaan yang menjadi sasaran pembinaan umumnya tertuju pada organisasi kepemudaan yang terdaftar pada Direktorat Sosial Politik Pemda Tingkat I dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar arah dan sasaran pembinaan cukup jelas dan akurat serta dapat menjangkau program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemuda di setiap provinsi tersebut.

Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tamat SD sampai dengan Sarjana. Namun, umumnya mereka adalah pemuda putus sekolah, yang tak dapat meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi, serta lulusan Perguruan Tinggi. Hampir keseluruhan pemuda tersebut belum memiliki pekerjaan tetap bahkan banyak yang masih menganggur.

Usul rancangan program pembinaan kepemudaan diajukan oleh Dinas yang menangani kegiatan dan program pembinaan pemuda, dalam hal ini Dinas Diknas dan Dispora ke Pemda Provinsi untuk kemudian diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Pemda. Namun terdapat Provinsi yang tidak mengalokasikan dana secara khusus untuk pembinaan pemuda dalam APBD-nya.

Berkaitan dengan kondisi yang diungkapkan di atas, maka usul-usul kegiatan yang diajukan oleh OKP, senantiasa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam mata anggaran DISPORA dan DIKNAS Provinsi yang telah masuk bagian APBD. Sedangkan usul-usul kegiatan kepemudaan di luar program DISPORA dan DIKNAS, diarahkan ke Pemda untuk pembiayaannya, karena DISPORA dan DIKNAS umumnya tidak memiliki dana taktis untuk itu, dana taktis hanya tersedia pada Pemda.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemuda, dinas yang menangani pemuda, mitra kerja pemuda, lurah/kepala desa, dan siswa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Program yang Dilakukan Dinas

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan, dinas pada umumnya sebagai penyelenggara sekaligus sebagai penanggungjawab program. Program tersebut ditetapkan bersama oleh Dinas, Diknas, atau instansi terkait lainnya. Tentu saja program tersebut berdasarkan masukan ataupun usulan dari beberapa instansi, baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, program kepemudaan yang pernah diselenggarakan oleh pegawai dinas dalam dua tahun terakhir antara lain; Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Latihan Kepemimpinan (LK), Pertukaran Pemuda Antara Provinsi (PPAP) dan Kemah Kesatuan Pemuda (KKP), Kelompok Pemuda Sebaya (Penanggulangan Narkoba), Latihan Kepemimpinan. Program lain misalnya, program peningkatan Aktivitas dan Mutu Kepemudaan, Program Partisipasi dan Wawasan Kepemudaan, Program Pengembangan Aktivitas Kepemudaan, atau pun Program Partisipasi dan Wawasan Pemuda.

Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, Program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) merupakan kegiatan yang sangat diminati. Ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam KUPP, namun kegiatan yang dilaksanakan umumnya merupakan hasil pelatihan berwirausaha oleh berbagai pihak, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

2. Keterlibatan Pemuda pada Program

Keterlibatan pemuda pada setiap program dapat dilihat dari peroleh informasi tentang program kepemudaan, jalur keikutsertaan, prosedur mengikuti program, jenis keterampilan yang diikuti, dan lama waktu mengikuti kegiatan.

- a. Perolehan informasi. Para pemuda peserta program memperoleh informasi melalui beberapa jalur di antaranya adalah pengumuman resmi pada kantor Dinas Pendidikan setempat, media massa, dan pihak lainnya.
- b. Jalur keikutsertaan. Para peserta mengikuti program kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dinas/Instansi Kepemudaan), organisasi kepemudaan dan LSM, kelompok pemuda nonorganisasi yang bersifat insidental, dan pihak lainnya yang memiliki perhatian terhadap kegiatan kepemudaan misalnya, perusahaan swasta.
- c. Prosedur mengikuti program. Untuk mengikuti program, pemuda mengikuti proses seleksi yang telah ditetapkan.

- d. Jenis keterampilan yang diikuti. Banyak sekali jenis keterampilan yang diikuti di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan, menjahit/konveksi, sablon, percetakan, elektronika, kerajinan tangan, industri kecil, pertukangan, perbengkelan, jasa (guide), seni (lukis dsb), komputer/internet, dan teknologi informasi. Tiga urutan tertinggi adalah sablon, menjahit, dan kerajinan tangan.
- e. Lamanya waktu mengikuti program keterampilan, pada umumnya dilaksanakan dalam waktu 7 hari.

3. Persepsi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan

Persepsi pemuda tentang program pendidikan dan keterampilan yang diikuti dapat dilihat dari aspek pentingnya program bagi pemuda, nilai tambah mengikuti program, kesulitan mengikuti program, dan penilaian terhadap tutor.

- a. Pentingnya program bagi pemuda. Keberadaan program dirasakan sangat penting, karena dapat menyalurkan bakat dan memberikan penghasilan.
- b. Nilai tambah mengikuti program. Program ini sangat bermanfaat untuk memberikan penghasilan dan menambah wawasan
- c. Kesulitan mengikuti program. Kesulitan umum yang dihadapi para peserta program adalah singkatnya waktu pelatihan dan dukungan dana setelah pelatihan
- d. Penilaian terhadap tutor. Secara umum tutor yang dipilih adalah mereka yang memiliki kecakapan memadai.

4. Keterkaitan Program dengan Harapan Memperoleh Pekerjaan atau dengan Pekerjaan yang Dimiliki

Keterkaitan program dengan harapan memperoleh pekerjaan atau dengan pekerjaan yang dimiliki dapat dilihat dari status pekerjaan, kesesuaian program dengan pekerjaan yang digeluti pemuda, manfaat program bagi pekerjaan yang digeluti, manfaat program dalam rangka mencari pekerjaan, perolehan pekerjaan setelah mengikuti program.

- a. Status pekerjaan. Sebagian besar peserta belum memiliki pekerjaan. Bagi yang sudah memiliki pekerjaan merasakan manfaat dari pelatihan yang mereka ikuti.
- b. Kesesuaian program dengan pekerjaan. Bagi yang telah memiliki pekerjaan terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan pelatihan yang mereka ikuti.
- c. Manfaat program terhadap pekerjaan. Program yang mereka ikuti bermanfaat bagi pekerjaan yang mereka lakukan.
- d. Manfaat program untuk memperoleh pekerjaan/berusaha. Bagi pemuda yang belum bekerja pelatihan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan dan membuat usaha sendiri.
- e. Perolehan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan keterampilan kepemudaan, sebagian besar menyatakan bahwa mereka dapat memperoleh pekerjaan, yaitu 76,71% dan yang tidak memperoleh pekerjaan setelah mereka mengikuti program tersebut 16,44%.

5. Perolehan Dana Bantuan Khusus (DBK) sebagai Modal Kerja/usaha

Perolehan dana bantuan khusus (DBK) sebagai modal kerja/usaha dilihat dari besarnya jumlah dana bantuan, manfaat dana bantuan, dan monitoring kegiatan.

- a. Besarnya jumlah Dana Bantuan Khusus. Jumlah dana bantuan yang mereka terima berkisar dari Rp 1.250.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
- b. Pemanfaatan DBK. Dana bantuan dimanfaatkan untuk tambahan modal dan atau modal awal untuk melaksanakan usaha, dan biasanya diberikan dalam wujud barang.
- c. Monitoring kegiatan. Monitoring kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terkait dengan dukungan dana pendamping kegiatan.

6. Persepsi tentang Bimbingan Usaha

Persepsi pemuda terhadap bimbingan usaha yang diberikan oleh tutor selama mengikuti pendidikan dan keterampilan kepemudaan dapat dilihat dari asal bimbingan usaha yang mereka peroleh dan intensitas bimbingan yang diberikan.

- a. Asal bimbingan usaha. Bimbingan usaha diperoleh dari mitra dan pihak penyelenggara program pelatihan.
- b. Intensitas bimbingan. Sebagian besar peserta program mendapatkan bimbingan dari mitra, hanya saja intensitas bimbingan kurang memadai.

7. Manfaat dan Prospek Pekerjaan/Usaha

Manfaat dan prospek pekerjaan dan usaha setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan keterampilan diidentifikasi dari besarnya penghasilan setelah mengikuti pendidikan dan keterampilan, dan prospek pekerjaan yang diperoleh.

1. Besarnya penghasilan pekerjaan/usaha. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pendapatan yang mereka miliki belum dapat mencukupi kebutuhan.
2. Prospek pekerjaan/usaha. Sebagian besar merasa optimis bahwa usaha yang mereka jalankan dapat bertahan.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan kegiatan usaha pemuda produktif antara lain:

- 1) Biaya yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah daerah, sehingga kegiatan pembinaan yang dilaksanakan terkadang belum mampu menjangkau keseluruhan sasaran sebagaimana yang diharapkan, seperti rekrutmen dalam program yang diselenggarakan baik personil maupun lokasi sasaran.
- 2) Selain itu, tidak tersedianya dana non-budget di DISPORA sehingga menyulitkan untuk memberikan bantuan terhadap program-program yang diusulkan OKP yang tidak terdapat dalam mata anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak terkait terutama instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan.
- 3) Lokasi atau jarak tempuh yang sangat jauh sehingga menyulitkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut, sehingga berakibat lambat atau sukarnya untuk melaksanakan koordinasi.
- 4) Penyelenggaraan pembinaan sangat terikat dengan batas waktu yang ditetapkan oleh proyek, sehingga muncul kesan tergesa-gesa.

- 5) Terlambatnya biaya yang diterima oleh pelaksana, termasuk bantuan untuk peserta di lapangan, bahkan biaya yang diterima terkadang belum mencukupi kebutuhan program yang dihadapi.
- 6) Penyelenggaraan kegiatan program pembinaan sangat terikat dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga muncul kesan tergesa-gesa dan kurang serius.
- 7) Otonomi daerah menyebabkan kebijakan pembinaan kepemudaan lebih banyak bergantung pada pemerintah kota/kabupaten, sementara pemerintah kota kurang memahami perannya, karena selama ini lebih banyak ditangani pemerintah pusat.
- 8) Kebijakan pembinaan usaha kelompok pemuda tidak sampai pada hasil yang diharapkan, karena usaha kelompok pemuda tidak berjalan lancar akibat bahan baku yang dibutuhkan sulit didapat setelah adanya kenaikan BBM, misalnya pada usaha pembuatan kerupuk ikan.
- 9) Adanya ketergantungan Pemda dalam hal pendanaan dan perencanaan program.
- 10) Terbatasnya infrastruktur pendukung pembinaan pemuda dan olahraga.
- 11) Terbatasnya Sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi instruktur ataupun narasumber yang mampu memberikan jenis keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal sehingga menghasilkan produk atau jasa yang layak jual.
- 12) Kurangnya pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagai tindak lanjut dari program Pendidikan Kecakapan Hidup.
- 13) Kurangnya bantuan promosi untuk dapat memperlancar pemasaran produk/jasa dari purnaprogram.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan KUPP di Provinsi Bengkulu dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Tingginya respon instansi terkait maupun stakeholder terhadap kegiatan ataupun program-program yang dilaksanakan.
- 2) Stakeholder umumnya cukup antusias dengan program-program yang ditawarkan kepada mereka. Tentunya hal ini akan merupakan tambahan energi bagi DISFORA untuk secara mantap dan berkesinambungan menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan program.
- 4) Adanya kemampuan, kemauan, dan kesempatan bagi peserta yang merupakan modal dasar dalam melakukan suatu kegiatan usaha.
- 5) Besarnya potensi pemuda dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha produktif.
- 6) Banyaknya sektor usaha yang dapat dilakukan
- 7) Luasnya kemungkinan pasar hasil produksi, sehingga dapat menjanjikan kelanggaan usaha.
- 8) Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai komitmen yang cukup baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
- 9) Potensi sumber daya alam yang terdapat di setiap daerah masih cukup banyak yang belum efektif dan diolah secara baik.

10) Beberapa organisasi kepemudaan sangat mendukung program-program yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Model pembinaan pendidikan dan keterampilan kepemudaan bisa diawali dengan munculnya gagasan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan keterampilan kepemudaan. Selanjutnya perlu disiapkan model yang hendak dilakukan dan lembaga yang akan melakukan. Langkah berikutnya yaitu identifikasi protensi program baik kelebihan maupun kelemahannya. Setelah langkah identifikasi program dilakukan, dipilih program yang paling tepat. Setelah program yang telah terpilih bisa disusun dengan baik, perlu disiapkan strategi pelaksanaan program dan menyusun instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi program. Sebelum program dilakukan, perlu orientasi terhadap para pengelola yang akan melakukan program tersebut, dan sosialisasi program terhadap stakeholder dan para pemuda. Setelah semua langkah di atas dilampai, maka program siap dilaksanakan. Setelah program dilaksanakan, diharapkan para pemuda bisa mempunyai kemandirian usaha. Dengan kata lain, terwujud pemuda yang inovatif, kreatif, dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darken Wald, Gordon G., 1982. *Adult Education: Foundation of Practice*, New York: Harper & Reno Publisher
- Depdiknas, 2000. *Teknis Membimbing Kelompok Usaha Pemuda Produktif (Modul 4)*, Jakarta: Depdiknas, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Direktorat Pendidikan Generasi Muda.
- Depdiknas, 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Pendidikan Nonformal*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
- DPP KNPI, 1993. *Menyongsong Masa Depan: Analisis Keberadaan dan Aktivitas KNPI*, Jakarta: Yayasan Piranti Ilmu
- Gafur, Abdul, 1982. *Kebijakan Nasional Kepemudaan di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menpora
- Jarwis, Peter, 1983. *Adult and Continuing Education: Theory and Practice*, New York: Nichols Publishing Company
- Rufinus Lahut dan J. Babari, 1993. *Pemuda dan Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Karya Pemuda Indonesia
- Sihadi, D.R., dkk, 1999. *Pedoman Pelatihan Pembimbing Kelompok Usaha Pemuda Produktif*, Jakarta: Bagian Proyek Pengemangan Sumber Daya Kepemudaan
- Sukamto, 1995. *Pedoman Perencanaan bagi Perusahaan Kecil*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yayasan Karya Pemuda Indonesia, 1998. *Derap Langkah Generasi Muda Indonesia*, Jakarta: Yayasan Karya Pemuda Indonesia

